

Proyek OBOR Cina Bisa Timbulkan Jebakan Utang?

1 Mei 2019 15.37 Hsin Hui Lin ehhlin@gmail.com [GELORA45] <GELORA45@yahoogroups.com> menulis:

Chinese Debt Trap

kata Ini di ciptakan oleh wartawan NYT , media Amerika yg selalu menyerang TKK. Wartawan itu menulis tentang hutang jebakkan Tkk pd Sri Lanka dn terutama menyoroti lease 99 tahun pelabuhan Hambantota pd Tiongkok.

Sebenarnya lease pada "perusahaan bersama" joint venture SL Port Authority + China Merchants Port, jadi bukan suatu lease 100% pd TKK!!!

Karena keuangan negara lemah maka mulanya saham SL Port Authority - SLPA, hanya antara 15 - 20% dan hitungannya dr bagi keuntungan dari hasil operasi Hambantota Port, SLPA akan membeli "kembali" saham yg ditangan perusahaan Tkk dan dalam jangka tertentu diperhitungkan akan bisa meningkatkan saham SLPA dan mencapai 49% ,CMP memegang 51%.

Hutang Sri Lanka pada Tkk kurang lebih 10% dari hutang luar negri Sri Lanka, terutama negara2 barat, Jepang , WB, IMF dan lain2 institue finans.

Sejarah Pelabuhan Hambantota, rencana membangun sejak 1994, tapi tak ada modal, negara2 barat dan badan finanse internasional IMF, ADB, WB dn lain tak hendak memberi pinjaman, selama duapuluhan tahun rencana hanya diatas kertas, lalu minta bantuan finans TKK dan dibangunlah dgn pinjaman keuangan dn kontraktor Tkk....design pelabuhan oleh perusahaan barat, dari Perancis(?).

Jumlah kapal yg berlabuh yg hanya 150-an setahun sekarang sudah meningkat ke 390-an, nothing kalau dibanding dgn pelabuhan seperti Colombo, Singapore, ... tetapi pasti akan melonjak dalam tahun2 mendatang setelah peralatan pelabuhan komplit dan selesai dan operatif. Modal asingpun mulai tertarik pada Hambantota, suatu perusahaan timur tengah akan membangun refinery minyak di sana dalam lingkungan industrial park yg dibangun Tkk.

Duta besar Singapore setelah meninjau Hambatota Port berkomentar "Singapore hss to look for anothr job" - Singapore harus dgn berat bersaing dgn Hambatota dihari depan!

Hutang Colombo pada Tkk sekitar 10.5% dr seluruh hutang luar negeri, USD 10+billion, - 65% adalah hutang konsesasi dgn bunga yg lebih rendah dr bunga internasional.

Contoh nyata, **di Greece, pelabuhan Piraeus** yg sebelumnya terkenal hampir total bangkrut, ... IMF, WB dan negara2 barat tak ada yg hendak lebih lanjut memberi pinjaman pd Greece yg ekonominya....mereka menekan agar Greece "menjual" asset2 negara, termasuk pelabuhan Piraeus.....tak ada "pembeli" barat, achir Cosco dr Tkk masuk dan dapat lease satu darmaga, sewaktu PM Greece yg sekarang Tsipras naik panggung ia berrencana untuk membatalkan lease pelabuhan pd Cosco,.... tetapi kenyataannya sekarang seluruh pelabuhan Piraeus di lease-kan pd Cosco..... Piraeus yg turun sampai ke no.96 dalam ranking pelabuhan internasional dn kemudian menjadi pelabuhan "mati", sekarang no.37 dalam ranking internasional dan diramalkan menjadi pelabuhan no.3 di eropa.....!!! Piraeus akan dihubungkan dgn negara2 Eropa tengah, timur dan negara2 Balkan.

PM Tsipras hadir dalam Forum BRI ke Dua di Beijing!!

Italy yg baru2 menggabung dgn BRI juga akan akan mengembangkan dua pelabuhan utama dalam rangka BRI dan dilanjutkan membangun infrastructure darat modern yg menghubungkan pelabuhan itu dgn negara2 eropa barat.

Pakistan.

Dalam rangka BRI TTK akan menyediakan penanaman modal sebesar 65 billion USD. Pembangunan jalan raya dari pelabuhan Gwadar di selatan sampai ujung utara - Kashmir, --yg disengketan India -- tapi dibawah administrasi Pakistan dn ini akan membuka jalan darat menghubungkan Pakistan dng TTK dn Asia Tengah. Tkk membangun pusat pembangkit listrik, jalur kereta api sampai Gwadar dn Gwadar suatu pelabuhan nelayan sedang dibangun deep water harbour dgn industrial park....hutang Pakistan pd Tkk...10%+ dari seluruh hutang luar negri. PM Imran Khan yg semula sangat skeptikal terhadap CPEC...China Pakistan Economic Cooperation... malah hadir dalam BRI FORUM II di Beijing baru2 ini.

Hutang **Pilipina** pd Tkk, 1.509 billion USD, hutangnya pd Jepang 20 billion USD. Hutang Pilipina pd Tkk sekitar 5%dari seluruh hutang luar negri. Presiden Duterte juga hadir dalam Forum BRI II di beijing.

PM **Mahatir** yg semula juga skeptis thd BRI dan proyek2 yg disetujui oleh PM Najib yg lalu, setelah direvisi dn dipotong ongkos proyek East Coast Railway project dgn sepertiga. Apakah dgn memangkas design semula atau cara lain? Tak tahu.

Bantuan dan kerjasama Tkk dgn negara2 lain sekarang lebih banyak disalurkan melalui BRI.

Mahathir juga hadir di Forum BRI kali ini dan dilanjutkan proyek K-api pantai

timur dan suatu proyek lain.

Umpama lagi bantuan Tkk pd Mexico masih hasil kerjasama Tkk Mesiko dn Mesiko bukan anggauta BRI.

Peru ikut mengabungkan dgn BRI.

Kalau diperhatikan Forum BRI I beberapa tahun yg lalu hanya dihadiri oleh belasan kepala negara, Forum BRI II, 37 kepala telah negara hadir --(Jusuf Kalla, wakil presiden mewakili Indonesia dan Pres. Jokowi yg tak bisa hadir kerana pemilihan umum) -- dan wakil/kepala negara dari 150 negara, termasuk Peru, Italy, Swiss, Hungary, Portugal telah menggabung dng BRI.

Jelas sekali BRI adalah inisiativ yg berhasil berkembang terus. India, Vietnam dn Japan tak hendak menggabung dalam BRI tapi Abe hadir dalam Forum BRI II ...!!

Forum BRI II jelas telah diformulasikan oleh 37 kepala negara yg hadir yalah tujuan BRI dan pedoman cara mencapai tujuan itu -- ini hasil perkembangan BRI yg telah menyimpulkan pengalaman positif dan negatif sebelumnya dan adopsi norma2 dr badan2 internasional lain - hadirnya IMF, WB suatu contoh nyata betapa dinamik BRI dan nyata BRI telah berkembang menjadi milik "banyak" negara dan betapa dinamik BRI kini.

Karena adanya BRI sekarang, negara2 Eropa barat "akan" menyediakan beberapa ratus billion Euro untuk pembangunan Afrika dn Amerika, Sedang beberapa sekutunya, Jepang, Canada dllnya juga akan menyediakan fund pembangunan negara2 terbelakang -- hal yg "baik" bagi2 negara terbelakang -- tapi "kemurahan hati" yang tiba2 muncul dari negara2 barat dan Amerika plus sekutunya "bukan" jatuh dr langit "tanpa"! Tak akan terjadi kalau tak ada BRI !!!

Negara2 penerima bantuan melalui BRI juga harus menyadari bahwa bantuan finans dan tehnik dll seperi yg ditekankan Presiden Xi bukanlah untuk proyek vanity.

Ini bukanlah "berkah" yg jatuh dr langit, mereka harus dimanfaatkan dn "mengembalikan" pd BRI hingga dalam bentuk keuangan, share of tehnologi, pengalaman, semangat berkooperasi, kerja sama hingga bisa disalurkan melalui BRI atau langsung dgn negara2 lain.

Kalau toh ada "Jebakan Hutang" yg di triakan keras oleh Amerika dllnya, 150 negara BRI harus mengoreksinya.

Yg jelas jumlah anggauta BRI dari belasan, puluhan dan terus meningkat.

BRI Forum II yg dihadiri 37 kepala negara dgn jelas sekali mereka telah bersamasama men-formulasikan tujuan dan norma kerja BRI. ...artinya BRI maju terus walaupun ada triakan keras "jebakan hutang"

Lin

On 30-Apr-2019 5:36 AM,

"ChanCT SADAR@netvigator.com [GELORA45]" <GELORA45@yahoogroups..com> wrote:

"Jebakan Utang" proyek OBOR yang dijalankan Tiongkok hanyalah kentut busuk imperialisme AS yang sudah terdesak oleh kemajuan Tiongkok saja! Padahal sangat jelas selama ratusan tahun terakhir ini, justru AS dan negara-negara kapitalis-maju itulah yang gunakan utang mencekik leher negara lain dan mencocok hidung negara lain untuk "TAAT dan NURUT" kehdnak pemberi utang! Yang mengakibatkan negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia sampai sekarang TETAP terpuruk dalam kemiskinan, BELUM juga berhasil tegak berdiri sendiri menjadi negara maju dan makmur, ...

Sekarang didunia muncul RRT yang berkemampuan mengajukan proyek OBOR untuk mengajak negara-negara didunia maju bersama, untung bersama dan menang bersama, ... sudah 150 negara dengan derajat tertentu terlibat dan ikut serta dalam proyek OBOR ini. Usaha proyek OBOR ditentang keras oleh AS, menjadi ancaman-berat bagi posisi mengangangi dunia! Berteriaklah dengan suara sumbang, segala fitnah untuk membusukkan bantuan yang digelontorkan Tiongkok membuat rakyat negara-negara di Afrika menjadi jajahan yg papa-miskin, Sri Lanka, Las, Kamboja jadi milik Tiongkok akibat "jebakan utang"!

Sadarlah bahwa UTANG itu netral, adalah satu KESEMPATAN baik bisa digunakan siapa saja! Masalahnya digunakan untuk apa dan bagaimana menggunakannya!

Setiap negara TETAP mempunyai KEBEBASAN menentukan menerima utang darimanapun termasuk yg bisa diberikan Tiongkok dan akan digunakan untuk apa, ... Tentu jangan terima kalau utang diberikan dengan syarat mengikat dan merugikan! Pandai-pandailah menerima dan menggunakan utang itu untuk KEPENTINGAN pembangunan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat! Jangan biarkan segelintir pejabat menerima utang digunakan pembangunan proyek yg tidak bermanfaat dan dengan pertimbangan menggendutkan perut pejabat itu sendiri saja!

Jadi, yang **SALAH** bukan pemberi utang, tapi **PENERIMA UTANG** yang **TIDAK** menggunakan utang itu dengan baik!

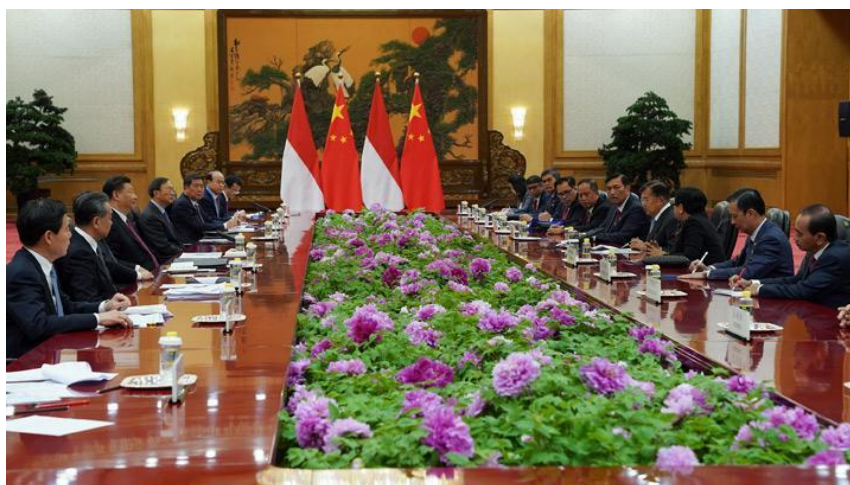
Walhi:

Proyek OBOR Cina Bisa Timbulkan Jebakan Utang Baru

Reporter: Francisca Christy Rosana

Editor: Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

Senin, 29 April 2019 13:07 WIB



TEMPO.CO, Jakarta - Skema perjanjian One Belt One Road atau Belt and Road Initiative (BRI) dengan pemerintah [Cina](#) dinilai bakal menimbulkan tiga kerugian tak langsung bagi negara-negara terkait.

Baca: [Menteri Luhut Yakin RI Terhindar dari Jebakan Utang Jalur Sutra Modern Cina](#)

Hal itu disampaikan oleh organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi.

"Pertama, BRI akan menjebak negara-negara mitra dalam jebakan utang ke Cina," ujar Manajer Kampanye dan Iklim Walhi, Yuyun Harmono saat ditemui di kantornya, Mampang, Jakarta Selatan, Senin, 29 April 2019.

Jebakan utang ini sebelumnya telah melilit negara yang menyepakati BRI dengan Cina, seperti Sri Lanka dan beberapa negara lainnya di Afrika. Dengan skema government to government atau g to g yang ditawarkan, Cina menjadi pemodal Sri Lanka untuk membangun Pelabuhan Hambantota di pantai selatan.

Cina pada 2017 menggelontorkan duit pinjaman senilai US\$ 1,5 miliar. Namun perjanjian ini berujung mudarat bagi Sri Lanka lantaran negara itu harus menyerahkan pelabuhannya kepada pemerintah Cina lantaran tak bisa melunasi utang.

Utang yang tidak terbayarkan itu berjumlah US\$ 8 miliar. Nilai utang ini setara dengan lebih dari 90 persen pendapatan domestik bruto rakyat Sri Lanka. Dengan demikian, pemerintah Sri Lanka mesti menyerahkan sekitar 50 persen saham pelabuhan kepada Cina dan harus melayani perusahaan milik Negeri Tirai Bambu itu selama 99 tahun.

Meski Indonesia menandatangani perjanjian dalam skema business to business, Yuyun memprediksi bukan tak mungkin pemerintah akan memberikan jaminan terhadap swasta. Yuyun juga mengungkapkan bahwa skema b to b yang ditawarkan pemerintah belum jelas. "Alasan b to b itu problematis karena selama ini kerja sama yang melibatkan utang luar negeri dijamin pemerintah," ujar Yuyun.

Kemungkinan kerugian kedua yang disoroti Walhi dengan adanya perjanjian ini adalah pemerintah menjadi tidak peka terhadap lingkungan hidup dan iklim. Menurut catatan WALHI, dari 28 Proyek senilai Rp 1,296 triliun yang ditawarkan pemerintah Indonesia, masih ada proyek-proyek listrik energi kotor batubara.

Di antaranya PLTU batubara berkapasitas 1.000 megawatt di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Tanah Kuning, Kalimantan Utara. Selain itu, PLTU Celukan berkapasitas 2x350 megawatt dan PLTU Mulut Tambang di Kalimantan Selatan-Tengah 3 dan 4, masing-masing berkapasitas 2x100 megawatt.

Dari proyek yang ditawarkan Indonesia, Walhi mencatat 42 persen di antaranya merupakan proyek kotor batubara yang tidak ramah lingkungan. Proyek itu, ujar dia, telah bertentangan dengan Kesepakatan Paris yang ditandatangani sejumlah negara tentang perubahan iklim dan pelestarian lingkungan.

Kerugian ketiga, proyek-proyek besar yang ditawarkan Indonesia untuk kesepakatan pendanaan BRI berpotensi korupsi. "Sudah ada contohnya di kasus PLTU 1 Riau yang melibatkan Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Di sana ada kontraktor Cina juga," ucap Yuyun. Proyek dengan skala besar ini berpotensi membuka peluang rasuah oleh pemain-pemain elite, baik swasta maupun pelat merah.

Kesepakatan BRI sebelumnya ditandai oleh pertemuan yang digelar di Beijing, Cina, pada 25-28 April 2019. Pertemuan yang sama sebelumnya telah digelar pada Mei 2017. Pertemuan ini dihadiri oleh lebih 37 negara termasuk Indonesia. Rombongan delegasi Indonesia dipimpin oleh wakil presiden Jusuf Kalla dan diikuti Menteri Koordinator Bidang

Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri luar Negeri Retno Marsudi, serta Menteri Ristek dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong.

Dalam pertemuan ini, pemerintah memberikan syarat bagi masuknya investasi asing dari Cina. Di antaranya investor Cina harus menggunakan tenaga kerja asal Indonesia. Lalu, perusahaan yang berinvestasi harus memproduksi barang yang bernilai tambah.

Baca: [JK Tagih Janji Cina Naikkan Impor Sawit dari RI](#)

Selanjutnya, perusahaan [Cina](#) wajib melakukan transfer teknologi kepada para pekerja lokal. Kemudian, pemerintah Indonesia memprioritaskan konsep investasi melalui skema b to b. Terakhir, jenis usaha yang dibangun harus ramah lingkungan. Poin terakhir ini, menurut Yuyun, justru dilanggar oleh Indonesia sebagai pembuat syarat karena pemerintah masih menawarkan proyek kotor batubara.